

**PENGEMBANGAN KUBE SEBAGAI PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT MISKIN PENERIMA PKH BERBASIS QUADRUPLE HELIX
(Studi Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin pada Program KUBE –PKH di Era
New Normal dikabupaten Pasuruan)**

Oleh

Agus Prianto¹

M. Sulhan²

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial Ilmu Politik, Universitas Yudharta

Pasuruan Jl. Yudharta. No. 07. Sengonagung

Email: sulhanartayudha@yudharta.ac.id

Abstrak:

Kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah yang proses pengentasan kemiskinan berbagai macam bentuk program termasuk PKH yang memberikan tranfer tunai sebagai bentuk pemutusan mata rantai kemiskinan. Dengan berjalannya program tersebut maka masih banyak kendala soal tujuan program tersebut. Dikabupaen pasuruan mayoritas KPM PKH relatif bersikap ketergantungan, Implusif dan juga konsumtif. Tingginya pembelanjaan tercapai saat pasca tranfer subsidi pada tingginya angka konsumsi rokok dan bukan pada kebutuhan dasar keluarga. Hal ini menjadi penyebab akan ketidak siapan KPM PKH untuk graduasi alamian maupun graduasi mandiri, dengan ketidak siapan akan graduasi maka juga berimbas akan program KUBE sebagai keberlanjutan akan ekonomi masyarakat penerima PKH oleh sebab itu pendekatan qudruple helix menjadi sebuah jawaban atas pembagian beban, pengembangan inovasi dan juga perubahan akan karakter KPM PKH yang tidak profuktif. Dalam penelitian menggunakan metodologi kualitatif yang dengan bersumber pada data primer dan skunder. Dari hasil penelitian ini terdapat akan ketidak berhasilan dalam program KUBE Mandiri sebab program yang dijalankan belum berbasis pada kearifan lokal, dan juga perilaku dan sikap KPM PKH masih pada impulsif, komsumtif dan ketergantungan pada bantuan subsid PKH. Sehingga tidak ada yang terdorong untuk kemandirian ekonomi KPM PKH. Dengan sistem kolaborasi dan kemitraan quadruple helix maka akan mampu mendorong bagi pengembangan masyarakat Penerima PKH untuk mampu merubah mainset yang akan memperbaiki sikap dan perilaku untuk lebih mandiri sebagai kemandirian ekonomi PKM yang dilaksanakan rintisan berbasis pada KUBE Mandiri PKM dikabupaten Pasuruan yang lebih maju dan berkembang

Kata kunci; KPM PKH, Graduasi Mandiri dan Quadruple Helix

Latar Belakang Masalah

Problem kemiskinan tidak hanya menjadi milik pedesaan sebagai kantong kemiskinan, tetapi juga merupakan menjadi masalah perkotaan sebagaimana Parsudi

Suparlan (1984) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya. Program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan atau PKH (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat dan fokus program tersebut pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Program PKH sebagaimana diperuntukan survive dan produktivitas terhadap kemampuan individu di dalam peranan sosial bermasyarakat yang tercermin perilaku sosial yang ditampakkan atas perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan dan atau rasa hormat terhadap orang lain yang meliputi aktivitas fisik dan psikis terhadap orang lain sebagai dasar tuntutan sosial (Hurlock, 2003:262).

Beberapa fenomena yang menarik dalam pelaksanaan PKH di kabupaten pasuruan banyak berfikir secara pragmatis, sebagaimana banyak status PKM PKH selesai sebab syarat dari peserta sudah tidak terpenuhi. Kondisi semikian sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang berpikir pragmatis, baik lingkungan organisasi dan ataupun kelompok kerja work group, selain itu juga dipengaruhi secara kepribadian personal life yang mencerminkan diri pribadi atas kepribadian dan keahlian, presepsi, sikap, nilai dan etika (Nelson and Qiuck, 2005) perilaku tersebut didorong oleh permasalahan pro-sosial mayoritas (Barry. Michael and Andrian Wilkinson , 2015)

Dalam penelitian menggunakan teori sebagai alat analisis *tools analysis* Quarduple Helix guna mengembangkan program PKH sebagai dasar menekan angka kemiskinan guna mewujudkan ekonomi kesejahteraan (*Welfare Economic*) yang melihat program KUBE sebagai rintisan program PKH yang menekan angka kolaborasi actor sebagai upaya menjawab problem kesejahteraan sosial dikabupaten Pasuruan untuk pambangan yang keberlanjutan *Sustainability Development* dalam pengetasan kemiskinan.

program pemberdayaan masyarakat yang selama ini menjadi salah satu trend kebijakan atau *bafer policy* strategi pemberdayaan masyarakat terutama pada Program PKH dengan identik bersifat top down atau program yang sistem berasal dari program

pusat, yang ditandai dengan kurang efektif dalam implementasi programnya, maka diperlukan inovasi sebagai program untuk pengentasan kemiskinan dengan pendekatan quadruple helix. Perspektif quadruple helix sebagai jaringan pemodelan pengentasan kemiskinan mendasarkan pada pola hubungan antar aktor dengan pola bottom up dan overlapping, sebagaimana organisasi publik dan swasta berinteraksi dalam proses penciptaan nilai untuk mengubah berbagai masukan menjadi keluaran program pengembangan model KUBE yang berdasarkan prinsip pada efektifitas dan efisiensi.

Sehingga pola pada proses bersifat relasional sebagaimana yang diatur didalam pengaturan quadruple helix, yaitu aktor (publik dan swasta) yang terlibat, sumber daya yang digabungkan, dan kegiatan yang dilakukan, serta hasil dari proses, yaitu , nilai yang diterima oleh para aktor yang terlibat dalam jaringan hubungan. Selain para pelaku yang dibahas terkait heliks, maka perlu juga membahas tentang organisasi hybrid yang mengintegrasikan, berkolaborasi, dan mengatur berbagai bidang quadruple helix untuk merangsang sebuah inovasi. Organisasi hybrid ini, misalnya, dapat menjadi taman sains dan inkubator yang menggabungkan beberapa lingkungan kelembagaan.

Fitur unik dari organisasi hybrid ini adalah bahwa mereka seringkali otonom dan tidak bertanggung jawab atau dikendalikan oleh satu lingkungan tertentu, peran hybrid ini tertampak pada inkubator Universitas. Organisasi hibrida ini dipandang sebagai perekat yang menghubungkan banyak aktor berbeda dalam jaringan heliks empat kali lipat dan bertindak sebagai katalis di antara para aktor dan menjadi hal penting dalam membicarakan peran hybrid didalam proses pengentasan kemiskinan.

Perspektif quadruple helix dapat mengembangkan konsep model interdependensi aktor, sumber daya, dan aktivitas dari perspektif mikro yang lebih inovative. Pola kerjasama dalam quadruple helix, bisa meningkatkan pemahaman kita tentang penciptaan nilai dan hubungan antara aktor, sumber daya, dan aktivitas dalam pengembangan inovasi. Sejalan dengan ini, kami membahas permasalahan tentang cakupan wilayah collaborasi antar aktor, guna menciptakan lingkungan di mana kewirausahaan dan inovasi dapat berkembang telah menjadi prioritas bagi pembuat keputusan dan politisi.

Menciptakan sistem inovasi dalam pengentasan kemiskinan melalui program PKH merupakan basis regional (Regional Inovasi System) dan juga membentuk

pemahaman tentang bagaimana sistem inovasi ini bekerja telah ditekankan sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan (Cooke, Uranga Gomez, dan Etxebarria 1997). Pendekatan Program KUBE berbasis pada quadruple helix dapat dilihat sebagai peningkatan dari perspektif triple helix yang tidak hanya berfokus pada aktor dari akademisi, pemerintah, dan industri, tetapi juga mengakui peningkatan peran yang dimainkan oleh masyarakat sipil. Quadruple helix sebagai pendekatan inovasi berorientasi pengguna yang fokus yang kuat pada kolaborasi dalam inovasi dan, khususnya, proses yang terjalin secara dinamis.

Dan mengambil perspektif pengguna akhir dan melihat helix keempat sebagai pengelompokan pemangku kepentingan utama lebih lanjut dalam sistem inovasi ini. Sejalan dengan itu mengambil perspektif pemangku kepentingan dan menangani pengguna inovasi sebagai heliks keempat, bertindak dalam lingkungan meso yang menangkaptak terhitung jumlahnya hubungan yang terjadi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Senada dengan itu, Colapinto dan Porlezza (2012) menyoroti bahwa bagian inti dari heliks keempat terkait dengan jaringan, transfer pengetahuan, dan modal manusia.

Quadruple Helix Sebagai Pengembangan Program KUBE

Pengetasan kemiskinan merupakan bagian dari upaya program pemberdayaan masyarakat yang selama ini menjadi salah satu trend kebijakan atau bafer policy strategi pemberdayaan masyarakat terutama pada Program PKH dengan identik bersifat top down atau program yang sistem berasal dari program pusat, yang ditandai dengan kurang efektif dalam implementasi programnya, maka diperlukan inovasi sebagai program untuk pengentasan kemiskinan dengan pendekatan quadruple helix.

Perspektif quadruple helix sebagai jaringan pemodelan pengentasan kemiskinan mendasarkan pada pola hubungan antar aktor dengan pola buttom up dan overlapping, sebagaimana organisasi publik dan swasta berinteraksi dalam proses penciptaan nilai untuk mengubah berbagai masukan menjadi keluaran program pengembangan model KUBE diri dengan prinsip pada efektifitas dan efisiensi. Sehingga pola pada proses bersifat relasional sebagaimana yang diatur didalam pengaturan quadruple helix, yaitu aktor (publik dan swasta) yang terlibat, sumber daya yang digabungkan, dan kegiatan

yang dilakukan, serta hasil dari proses, yaitu , nilai yang diterima oleh para aktor yang terlibat dalam jaringan hubungan.

Selain para pelaku yang dibahas terkait heliks, maka perlu juga membahas tentang organisasi hybrid yang mengintegrasikan, berkolaborasi, dan mengatur berbagai bidang quadruple helix untuk merangsang sebuah inovasi. Organisasi hibrid ini, misalnya, dapat menjadi taman sains dan inkubator yang menggabungkan beberapa lingkungan kelembagaan. Fitur unik dari organisasi hibrid ini adalah bahwa mereka seringkali otonom dan tidak bertanggung jawab atau dikendalikan oleh satu lingkungan tertentu, peran hibrid ini tertampak pada inkubator Universitas. Organisasi hibrida ini dipandang sebagai perekat yang menghubungkan banyak aktor berbeda dalam jaringan heliks empat kali lipat dan bertindak sebagai katalis di antara para aktor dan menjadi hal penting dalam membicarakan peran hibrid didalam proses pengentasan kemiskinan.

Dari sisi sasaran program pengembangan KUBE harus diperhatikan dalam hal ketepatan sasaran, kemandirian masyarakat, kemampuan manajerial masyarakat dan berdampak positif dari aspek sisi religius, sosial dan ekonomi. Dalam mendukung atas program tersebut diperlukan pola kerjasama yang terbentuk dalam kolaborasi antar aktor hal ini bisa pengembangan KUBE dalam perspektif quadruple helix dengan tujuan hubungan didalam perumusan model pengentasan kemiskinan. Dengan teori ini mampu memberikan konsep model inovasi. Dengan kerjasama mitra dalam kerangka prespektif quadruple helix, dapat mewujudkan sebuah tatanan dan nilai yang menghubungkan antara aktor, sumber daya, dan aktivitas dalam pengembangan inovasi. Sejalan dengan ini, kami membahas permasalahan tentang cakupan wilayah collaborasi antar aktor, guna menciptakan lingkungan di mana kewirausahaan dan inovasi dapat berkembang telah menjadi prioritas bagi pembuat keputusan dan politisi.

Menciptakan sistem inovasi dalam pengentasan kemiskinan melalui program PKH merupakan basis regional (Regional Inovasi System) dan juga membentuk pemahaman tentang bagaimana sistem inovasi ini bekerja telah ditekankan sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan (Cooke, Uranga Gomez, dan Etxebarria 1997). Pendekatan Program KUBE berbasis pada quadruple helix dapat dilihat sebagai peningkatan dari

perspektif triple helix yang tidak hanya berfokus pada aktor dari akademisi, pemerintah, dan industri, tetapi juga mengakui peningkatan peran yang dimainkan oleh masyarakat sipil (Leydesdorff 2012).

Quadruple helix sebagai pendekatan inovasi berorientasi pengguna yang fokus yang kuat pada kolaborasi dalam inovasi dan, khususnya, proses yang terjalin secara dinamis. Dan mengambil perspektif pengguna akhir dan melihat helix keempat sebagai pengelompokan pemangku kepentingan utama lebih lanjut dalam sistem inovasi ini. Sejalan dengan itu, McAdam, Miller, dan McAdam (2016) mengambil perspektif pemangku kepentingan dan menangani pengguna inovasi sebagai heliks keempat, bertindak dalam lingkungan meso yang menangkap tidak terhitung jumlahnya hubungan yang terjadi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Senada dengan itu, Colapinto dan Porlezza (2012) menyoroti bahwa bagian inti dari heliks keempat terkait dengan jaringan, transfer pengetahuan, dan modal manusia.

Performan Kebijakan Sektor Publik dalam Menanggulangi Kemiskinan

Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memperbaiki kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bermaksud agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka program KUBE sebagai keberlanjutan PKH. Membahas kinerja (Wibowo, 2007.,p.8) memiliki pengertian *performance* yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja berkaitan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Kinerja kebijakan sektor Publik (Mahsun, 2006.,p.25) memiliki arti mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target- target tertentu yang hendak dicapai. Konsep kinerja

pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu (Pasalong,2010.,p.175) kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi dan kinerja organisasi merupakan efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan sektor publik terpengaruhi oleh berbagai dimensi (Parmenter,2007.,p.14) dimensi teknologi, dimensi kualitas SDM, Dimensi Leaderships, Dimensi Measurement, Dimensi Reporting and improving performance, Dimensi Customer, dimensi Organizational strateg yang semua bermuara pada personal, secara jelas tersaji terlihat dalam gambar serikut:



Sumber ; Parmenter 2007

Kinerja organisasi pada sektor publik memang tidak semata-mata dipengaruhi oleh kinerja individual atau kinerja tim saja, namun dipengaruhi oleh faktor yang lebih luas dan kompleks (Mahmudi, 2015.,p.13-15). Faktor lingkungan meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum yang didalamnya organisasi beroperasi. Selain faktor lingkungan eksternal, faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah kepemimpinan, struktur organisasi, strategi pilihan, dukungan teknologi, kultur organisasi dan proses organisasi. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi publik, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor internal seperti faktor personal, kepemimpinan, kerja tim,

sistem, struktur organisasi, strategi pilihan, kultur organisasi, dukungan teknologi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu faktor situasional/lingkungan (ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum).

Metodologi

Metode yang dipakai adalah kualitatif (Denzin dan Lincoln, 1997) sebagai upaya menganalisis program keberlanjutan Program PKH sebagai kemandirian ekonomi PKM PKH dengan lokus penelitian adalah di Kabupaten Pasuruan dan fokus KUBE PKH. Sebagai upaya pengumpulan data meliputi tahap *getting in* dalam tahap ini peneliti dengan membawa izin formal memasuki lokasi penelitian *getting along*. Dalam penelitian kualitatif teknik mengumpulkan data (*logging the data*) sebagaimana dibawah ini; Observasi, Interview/Wawancara, dan Informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan kategori data yang intinya agar dapat disusun kesimpulan sementara untuk dimodifikasi dan dikembangkan dari kasus-kasus yang ditemui. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014) menyebutkan bahwa proses analisis data penelitian merupakan aktivitas tiga arus penelitian secara bersamaan yakni (1) kondensasi data, (2) tampilan data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

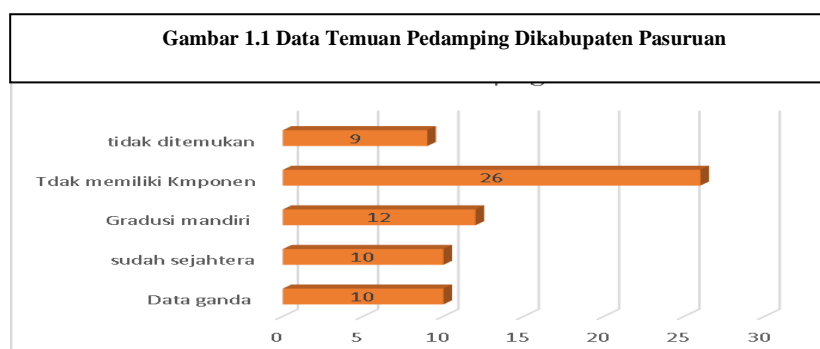
Model Quadruple Helix Pada Program KUBE bagi KPM PKH

Program PKH sebagai program pengentasan kemiskinan berupa bantuan bidang kesehatan dan pendidikan yang ditujukan pada masyarakat miskin agar supaya memiliki tingkat taraf hidup dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan membutuhkan penangan yang tepat sebagai bentuk partisipasi masyarakat (Drezkiewicz, Anna et. All, 2015) sebab merupakan daerah pedesaan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan adalah uang, selain itu ditemukan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah kaya, memiliki potensi , banyak pedatang untuk bekerja dan tingkat kemiskinan relatif tinggi yang dilihat secara makro penduduk miskin terhadap populasi cenderung menurun dari tahun 2017 dengan angka 9,74 sedangkan tahun 2018 dengan angka 9,84 dan ditahun 2019 turun 9,31 begitu juga pada tingkat kemiskinan kota ditahun

2017 dengan angka 4,27 kemudian tahun 2018 turun menjadi 4,14 dan ditahun 2019 mengalami kenaikan hingga menajpai 4,31 (Data Susenas, 2019).

Bantuan PKH kepada masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan tidak memiliki dampak yang baik, justru menciptakan ketergantungan bagi penerima PKH dengan menganggap bantuan PKH tersebut sebagai tambahan pendapatan dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu perilaku masyarakat yang merasa berhak dan menjadi salah satu sifat transeden yakni adanya anggapan dan presepsi bantuan itu merupakan rejeki bagi mereka, sehingga dalam proses pengambilan keputusan masyarakat terhadap bantuan menyebabkan konflik horisontal / konflik antar warga. Meskipun dalam distribusi sudah selektif dan terupdate namun realisasi atas penerima PKH masih menjadi kedala bagi pendamping PKH.

Perilaku Ketergantungan dan anggapan rizki merupakan pembiasaan atas tujuan dari program PKH yakni memiliki tujuan bahwa bantuan adalah jangka pendek yang artinya bahwa bantuan tersebut tidak permanen dan diharapkan berimplikasi pada masyarakat miskin lainnya dengan bergantian dengan keluarga miskin lainnya. dari lapangan terlihat perilaku ketergantungan masyarakat pada aspek kemandirian ekonomi, sangat kurang berkembang sebagai data dilapangan kurun waktu 2018-2019 lebih banyak status anggota penerima PKH habis dan masih dalam kategori tidak memiliki komponen (Gambar 1.1), artinya bahwa masyarakat penerima PKH tidak memilik kemandirian



Sumber Data; Laporan PKH Tahun 2018 – 2019 yang diolah Peneliti

Selain data ketidak mandirian Penerima PKH yang akhir keanggotaan sebab tidak memiliki komponen, juga berdampak pada sustainabel program PKH yakni tidak adanya KUBE sebagai pemberdayaan keberlanjutan PKH sebagai program perlindungan dan

pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

Bentuk perilaku masyarakat penerima PKH yang sadar terhadap pendidikan, dan kesehatan masih bersifat *hedonisme* yakni adanya perilaku mencari keuntungan bagi masyarakat penerima PKH hanya sebatas bagaimana menerima bantuan PKH dijadikan tambahan penghasilan dengan mengesampingkan adanya kebutuhan pada pendidikan anaknya hal ini terlihat terhadap kecukupan pemenuhan kebutuhan bagi anak penerima PKH dan juga datangnya ke Puskesmas oleh Wamil yang didasari atas persepsi kekhawatiran jika bantuan PKH akan di tangguhkan, sehingga persepsi atas bantuan PKH akan mendasari cara berfikir dalam pengambilan keputusan penggunaan bantuan tidak tepat sasaran yang dijadikan sebagai tambahan penghasilan sehingga perilaku masyarakat penggunaan bantuan tidak selalu tepat sasaran atau masih digunakan untuk yang lain terutama jika bantuan dan PKM pada kondisi tidak ada uang, maka bantuan akan digunakan meskipun demikian masih mengutamakan kepentingan pendidikan dan kesehatan anak.

Selain hal ini tampak bahwa masyarakat masih berfikir pragmatis terdapat juga perilaku masyarakat yang tidak memiliki pemikiran lebih jauh sebagaimana masyarakat penerima PKH tidak memiliki tabungan dan investasi, hal ini menjadi bentuk perilaku impulsif. Dorongan perilaku impulsif masyarakat Kabupaten Pasuruan dipengaruhi oleh faktor situasional seperti rendahnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua rendah yang menyebabkan rendahnya wawasan orang tua, ketidak pedulian terhadap lingkungan, dan masyarakat miskin pekerjaan serabutan.

Perilaku hedonisme dan impulsif masyarakat penerima PKH senantiasa mengesampingkan tujuan Program PKH, sebagaimana Pemerintah Pusat memberikan bantuan secara langsung melalui ATM namun dari hasil observasi telah menemukan bahwa membuka rekening tabungan tidak bisa meningkatkan kemauan untuk menunda kepuasan dikalangan rumah tangga miskin di Kabupaten Pasuruan dan juga tingkat konsumsi makanan masih naik sejalan tranfer uang tunai telah didapat bagi penerima PKH, artinya bahwa pola perilaku penerima PKH akan tinggi konsumsi sejalan dengan

adanya tranfer uang tunai demikian ini perilaku penerima PKH yang *hedonise*, ketergantungan dan *Impusif*.

Perilaku penerima PKH perlu untuk diintervensi didalam merubah perilaku (Davis. Rachel. et all, 2015) agar supaya perlaku baik yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan sebagai tujuan PKH sehingga bantuan tersebut dilakukan dengan cara yang tepat pula, selama ini dalam pendekatan kesadaran perilaku sehat dilakukan dengan cara intervensi atas kemampuan dan motivasi individu, dalam pendekatan penelitian ini perlu adanya pendekatan perubahan sosial dengan pendekatan faktor sosial, budaya, dan ekonomi atau perlu adanya tekana psikosocial (Stevens, Joyce West, 2001) guna penyesuaian dalam perilaku penerima PKH sebagaimana normativ program maka perlu sekali adanya penguatan penerima KPM PKH sebagai proses peningkatan partisipasi KPM PKH sebagai undur ke empat atas inovasi akan pengembangan KUBE dalam pemberdayaan KPM PKH (Lundvall, 1992) sedangkan inovasi bisa dicapai dengan quadruple helix sebagaimana peranan Pemerintah, Swasta, Akademisi/ PT dan Masyarakat yang bersifat interaktif dan buttom - up dengan penggambungan peranan Akademisi dan perusahaan/ swasta (piranen & Koski, 2004) sebagai upaya inovasi dalam pengembangan KUBE.

Sikap kemitraan tercermin pada sikap masyarakat dalam mendukung KUBE sebagai bentuk keberlanjutan program PKH sebagai pengentasan kemiskinan yang mengarah pada program subsidi dalam bentuk PKH, jusru memperlihatkan sikap dan perilaku masyarakat yang masih dalam ranah pragmatisme, dimana diharapkan masyarakat untuk selalu berharap mendapatkan program bantuan dan kenggenan untuk melepas penerima bantuan PKH itu jika kondisi perekonomian sudah selesai.

Keengganan bagi masyarakat itu, menjadi perilaku secara kolektif bagi kabupaten pasuruan. Kondisi tersebut terlihat sebagaimana data menjelaskan penerima PKH yang tidak menerima program bantuan PKH dikabupaten pasuruan pada tahun 2020 relatif menurun sebanyak 2.476 KPM dari jumlah 92.111 orang menjadi 89.635 KPM hal ini mayoritas sebab tidak memiliki komponen KPM PKH yang relatif tinggi sedangkan graduasi mandiri masih terbilang tidak ada.

Lain halnya dengan program bantuan yang langsung dibagikan kepada penduduk miskin, Pemerintah juga telah menganggarkan rupiah yang besar untuk program dana

desa. Dana Desa (DD) untuk 360 desa yang tersebar dikabupaten Pasuruan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2020 penerimaan Dana Desa sebesar 365.663.562.000. Jumlah ini meningkat sekitar Rp 600 jutaan dari nilai yang sama di tahun lalu.. Menurut UU Desa, dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik), serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa. Tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan kota-desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Dari total alokasi DD yang ditetapkan, Desa Jatirejo di Kecamatan Lekok menjadi penerima DD tertinggi, yakni mencapai Rp. 2.283.429.000. Sedangkan desa penerima DD Terendah adalah Desa Arjosari di Kecamatan Rejoso dengan alokasi sebesar Rp. 801.637.000. Menurut Huda, besar kecilnya jumlah DD tergantung dari banyak tidaknya warga miskin yang berada di desa tersebut. Rata-rata penerima DD mulai Rp 800 juta hingga Rp 1,6 Milyar.

Program Subsidi seperti halnya PKH; adalah Salah satu bentuk intervensi untuk memutuskan rantai kemiskinan adalah melalui Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) yang merupakan bantuan sosial yang bersifat inovatif dan semakin populer. Pendekatan ini memberikan uang kepada keluarga miskin yang diberikan berdasarkan perilaku tertentu dan dimaksudkan sebagai investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan diorientasikan sebagai bagian dari strategi pemberantasan kemiskinan. Menurut Fiszbein & Schady (2009) bantuan tunai bersyarat/CCT bertujuan memberikan bantuan tunai untuk membiayai kebutuhan saat ini namun penerimaannya mensyaratkan perilaku tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah secara rutin/teratur atau memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar.

Dalam kegiatan ini menyatakan banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa rumah tangga terbatas pengetahuannya mengenai tindakan yang semestinya diambil, maka program sosial yang mendorong mereka melakukan tindakan yang tepat akan mendorong perbaikan kesejahteraan. Berdasarkan hasil empiris, terkait perilaku penerima KPH dikabupaten Pasuruan, terdapat pengaruh perilaku KPM PKH oleh faktor lingkungan, dimana pengaruh itu bisa bersifat positif maupun negatif. Adapun sifat positif yakni ditunjukkan oleh sikap masyarakat yang merasa tidak layak untuk menerima

bantuan PKH ataupun merasa sudah tidak layak kerana merasa banyak yang masih membutuhkan sehingga dengan suka rela untuk melakukan graduasi mandiri, sedangkan sikap negatif dapat ditunjukkan dengan adanya sikap keinginan menjadi keluarga penerima manfaat PKH meskipun tidak termasuk komponen penerima PKH, ada juga yang sudah sejahtera namun tidak mau melepaskan atau graduasi mandiri dengan alasan bahwa subsis PKH merupakan rizqi yang haris diterima.

Gambaran tersebut terlihat bagaimana corak masyarakat berbeda antara satu dengan yang lain, dikabupaten Pasuruan KPM PKH yang suka rela dalam mengikuti tahapan Graduasi Mandiri (GM) dari 24 Kecamatan, 360 desa sebanyak 250.000 KPM PKH. Dan KUBE PKH dikabupaten pasuruan tidak berkaitan sebagai kemandirian program PKH. Sebagaimana pada tahun 2020, dengan jumlah penduduknya mencapai 1.637.682,000 jiwa yang tersebar diberbagai wilayah dengan keluasan 1.474,02 km² atau tingkat sebaran penduduk 12 jiwa/km. Jumlah desa kecamatan yang memiliki usaha mandiri untuk tindak lanjut terkait program PKH guna menanggulangi belum mandiri Keluarga Penerima manfaat PKH masih berada pada di dua kecamatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. KUBE Pasca Program PKH di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK	JUMLAH DANA DITERIMA
1	Grati	2 Kelompok	20 orang x Rp.2.000.000 =Rp.40.000.000
2	Purwosari	3 Kelompok	32 orang x Rp.2.000.000 =Rp.64.000.000
3	Pandaan	1 Kelompok	15 orang x Rp.2.000.000 =Rp.30.000.000
4	Bangil	1 Kelompok	10 orang x Rp.2.000.000 =Rp.20.000.000
TOTAL DANA			Rp. 154.000.000

Sumber data; Dinsos PKH Kab. Pasuruan T.A 2020

Tingginya KUBE dikabupaten Pasuruan masih cukup banyak, namun tujuh kelompok ditas berbasis pada pada PKH sebagaimana KUBE Mandiri PKH. Dari 77 anggota seluruhnya orietnasi pada peternakan dan juga usaha merancang. Dari usaha tersebut banyak yang tidak memiliki potensi masyarakat. Sehingga belum memiliki keberlanjutan program usaha tersebut. Persaoalan untuk membangun pemahaman atas keberlanjutan KUBE Mandiri PKH masih belum terwujudkan sebab terkait dengan potensi dan latar belakang akan kemampuan masyarakat KPM PKH. Hal ini berdampak pada masih rendahnya graduasi mandiri bagi KPM PKH.

Jangkauan Pengentasan Kemiskinan Program KUBE Berbasis Quadruple Helix

Pengentasan kemiskinan berbasisi Quadruple helix (QH) secara umum mengarah pada pola kerjasama antar pihak didalam pengembangan KUBE PKH. Pola hubungan antar aktor harus memenuhi sebagaimana adanya kemampuan pihak masyarakat untuk mengikuti apa yang menjadi inovasi terhadap pemberdayaan pengentasan kemiskinan pada masyarakat desa penerima PKH, sebagaimana KUBE yang didorong oleh Dinas Sosial adalah KUBE Mnadiri PKH sebagaimana orietnasi pada motivasi KPM PKH untuk bisa graduasi mandiri. Oleh karena itu dalam aktor Quadruple Helix terdapat pemataan aktor yang meliputi;

1. Akor Pemerintah;

Peran pemerintah adalah mendistribusi bantuan PKM PKH dengan memberikan persyaratan bagi masyarakat miskin sebagai KPM PKH dan juga mendistribusikan bantuan dana sebagai usaha KPM PKH dalam bentuk usaha kelompok. Sebab dalam hal ini pemerintah yang memiliki anggaran dan kewenangan dalam penggunaan anggaran sebagai bentuk kinerja pembangunan pemerintah daerah.

2. Akademisi;

kolaborasi yang berperan penting dalam pengembangan adalah perguruan tinggi yang berperan sangat penting dalam inovasi program pengembangan KUBE pada program PKH sebagai bentuk usaha pengentasan dan persiapan dalam mendorong graduasi mandiri bagi penerima PKH.

3. Aktor Swasta;

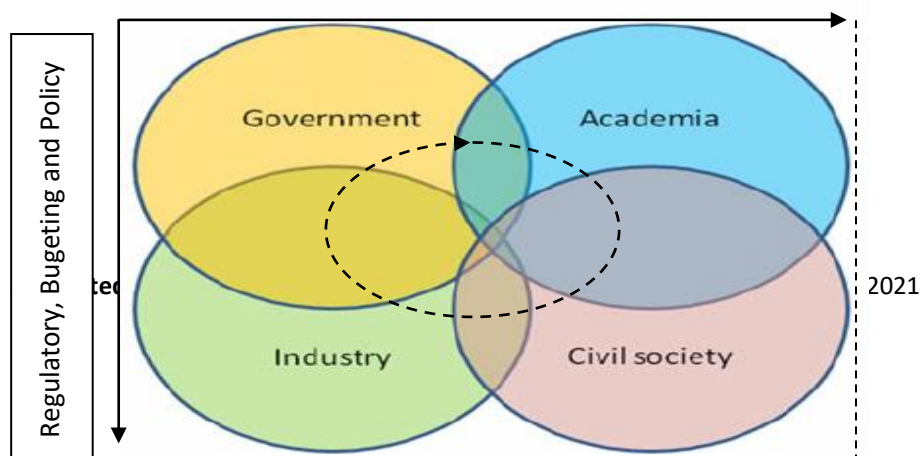
Mayoritas KUBE Mandiri berbentuk usaha dagang sembako dan juga peternakan. Dalam usaha tersebut peran kemitraan akan lebih mampu mendorong dalam kemandirian usaha dan kedisiplinan sebab dalam sistem usaha kedepan akan mereplikasi atas sistem usaha yang sudah berjalan. Kondisional tersebut mampu menekan akan sifat impulsif, ketergantungan PKM PKH sehingga memiliki otos kerja untuk berwirausaha.

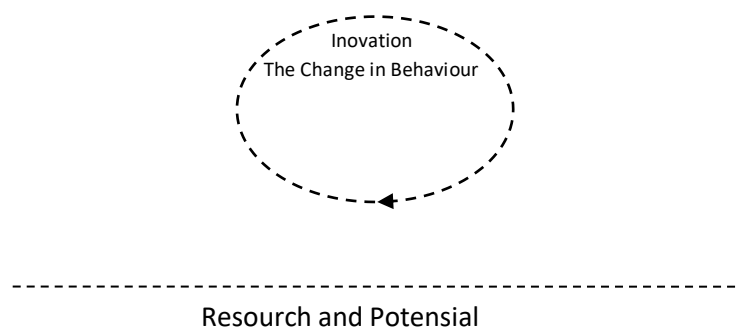
4. Aktor Masyarakat

Pada aktor masyarakat ditujukan pada penerima PKH sebagai objek yang dibutuhkan untuk dikembangkan sebagai inovasi kemandirian ekonomi pada Program KUBE Mandiri PKH. Objek penerima PKH lebih pada sifat impulsif, ketergantungan dan konsumtif. Oleh sebab itu sentuhan – sentuhan inovasi untuk penerima PKH agar siap pada level Graduasi Mandiri.

Peranan dari masing-masing aktor berbeda, dan pola hubungan kerjasama dari waktu-kewaktu tidak ditentukan apa yang menjadi ruang lingkungannya sebab pola quadruple helix bisa bervariasi dari waktu ke waktu. hubungan berkembang dari keterlibatan antar aktor dalam proses inovasi menjadi mitra terafiliasi. Oleh sebab itu peran aktor dalam inisiatif quadruple helix dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dapat memiliki banyak peran dalam kolaborasi serta termasuk dalam salah satu Heliks.

Sejalan dengan model quadruple helix kami berpendapat bahwa heliks keempat berpusat KPM PKH untuk mampu graduasi secara mandiri. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan KPM PKH bisa merubah paradigma masyarakat yang implusif, ketergantungan dan kosumstif. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat ruang berbeda dan berfungsi sebagai pengguna dari mitra ke empat helix adalah aktor KPM PKH dalam Pengembangan KUBE Mandiri PKH. Dalam model ini pemberdayaan masyarakat berbasis QH akan berada pada titik overlapping dari setiap aktor tersebut sebagai bentuk inovasi. Dalam pola hubungan antar aktor digambarkan sebagai mana berikut;





Pola hubungan didalam QH mensyaratkan dinamika kerjasama dengan menunjukkan bahwa aktor pemerintah, industri, dan akademisi, sering bertindak sebagai pengguna dalam satu atau lain cara dari waktu ke waktu. Sedangkan heliks keempat adalah masyarakat sipil, konsumen, dan pengguna akhir (McAdam, dan McAdam, 2016) yang dimaskudkan pada KPM PKH.

Dalam pola hubungan dari aktor dalam QA merupakan jejaring dalam pola hubungan dimana organisasi publik dan swasta melakukan interaksi sehingga proses penciptaan nilai untuk mengubah KUBE Mandiri PKH lebih bisa berkembang dan mampu mempersiapkan KPM PKH untuk graduasi mandiri berbasis kewirasuahan, hal ini diperlukan berbagai masukan menjadi luaran yang berharga bagi keempat helix. Penekanan konsep HQ dalam pengentasan kemiskinan ini adalah pada proses relasional yang terjadi dalam pengaturan quadruple helix, yaitu aktor (publik dan swasta) yang terlibat, sumber daya yang digabungkan, dan kegiatan yang dilakukan, serta hasil dari proses, yaitu; nilai yang diterima oleh para aktor yang terlibat dalam jaringan hubungan yang saling bergantung. Selain para pelaku yang dibahas terkait heliks, makalah ini juga membahas tentang organisasi hybrid atau inkubator yang mengintegrasikan, berkolaborasi, dan mengatur berbagai bidang quadruple helix untuk merangsang Inovasi.

Arah Pengembangan KUBE sebagai Kemandirian Ekonomi PKH Berbasis Quadruple Helix Agar model pengembangan KUBE PKH berbasis Quadruple Helix (QH) mampu membentuk sebuah Inovasi ditengah multi dimensi problem pengembangan KUBE sebagai program strategi yang mendorong kemandirian ekonomi penerima PKH. Maka diperlukan sebuah kejelasan informasi terkait ; 1) Potensi Desa; 2) Objek

Pemberdayaan sebagai Mitra; 3) Kriteria Pihak yang akan diberdayakan; 4) instrumen pemberdayaan; 5) Sumberdaya pendukung; dan 6) Sistem pemberdayaan

Ruang Lingkup Pemberdayaan KUBE PKH pada ruang lingkup QH sebagai model pengembangan KUBE PKH yang terbentuk dalam program pemberdayaan, maka menempatkan masyarakat merupakan obyek dan subyek pemberdayaan, obyek pemberdayaan adalah merupakan bidang kegiatan pemberdayaan dan subyek pemberdayaan adalah masyarakat penerima PKH untuk diberdayakan dan yang memberdayakan. . Dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak sekali sisi-sisi kehidupan dapat dilihat dalam wawasan kebangsaan, yaitu idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan; maka berbagai hal itulah jangkauan pemberdayaan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan analisis dan kajian yang telah di lakukan sebagaimana pembahasan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan belum mempunyai memiliki program yang efektif didalam menekan atau menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ditahun 2020, kabupaten pasuruan merupakan wilayah yang angka kemiskinan tertinggi di Jawa timur terlihat pada kondisi pemerataan pendapatan para penerima manfaat belum merata yaitu berada dalam kondisi sedang menurut kriteria Gini Ratio. Para penerima manfaat masih mengharapkan program serupa tetap berkelanjutan.

Program pemberdayaan di bidang ekonomi bagi KPM PKH berbasis pad KUBE Mandiri PKH yang dilaksanakan oleh pemberdaya masih menitikberatkan pada keberhasilan program secara administratif. Demikian pula dari sisi penerima manfaat, pemanfaatan stimulasi pinjaman pemberdayaan masih lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan komsumtif, sehingga menimbulkan ketergantungan. Perosalan rendahnya graduasi Mandiri yang dapat ditekan dengan sistem pemodelan pengentasan kemiskinan berbasis Quadruple Helix (QH) pada Program KUBE Mandiri PKH mampu memberikan ruang bagi aktor pemerintah, private sektor dan akademik dengan peran yang berbeda namun saling sinergis dan semua kegiatan bermuara Inovasi pada masyarakat miskin penerima KPM PKH.

Kesimpulan

Program kemandiria ekonomi yang terbentuk pada Graduasi Mandiri bagi KPM PKH masih relatif sedikit hal ini menjadikan angka kemiskinan di kabupaten pasuruan masih tinggi, hal ini sebab sudah menjadi *mindset* masyarakat penerima PKH lebih bersifat pragmatis, impulsif dan ketergantungan. Hal demikian penyebab penerima PKH yang tidak berkeinginan melepas ke anggota sebagai penerima PKH dengan menganggap bahwa bantuan PKH dimaknai sebagai tambahan pendapatan keluarga dan distribusi PKH memicu konflik dan keceburuan sosial masyarakat dan penduduk penerima PKH, hal ini berimplikasi terhadap apa yang menjadi penyebab akan persoalan rendahnya Graduasi mandiri dan kegagalan akan KUBE Mandiri PKH untuk tidak berkesinambungan. Oleh sebab itu dengan inovasi pengembangan KUBE Mandiri PKH dalam prespektif Qudruple Helix akan bisa mendorong akan perubahan sikap *mindset* KPM PKH untuk siap dalam kemandirian ekonomi dan terwujudnya graduasi mandiri.

Dengan peran aktor pemerintah sebagai pemilik regulasi dan anggaran, perguruan tinggi memiliki inovasi sebagai riset dan pembangunan program KUBE Mandiri PKH yang inovatif dan kompetitif dengan bekerjasama dengan sektor swasta untuk unit bisnis. Dari ketiga aktor tersebut berorientasi untuk merubah sikap dan perilaku dalam penerima PKH untuk siap dan inovatif sehingga akan graduasi mandiri.

Daftar Pustaka

- Cooke, P., Gomez Uranga, M., & Etxebarria, G. (1997). Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions. *Research Policy*, 26(4), 475-491. doi: [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(97\)00025-5](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(97)00025-5)
- Denzin and Y. Lincoln. (1997), *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage
- Hurlock, 2003. "*Psikologi Perkembangan*", Erlangga, Jakarta
- Leydesdorff, L. (2012). The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy? *Journal of the Knowledge Economy*, 3(1), 25-35. doi: 10.1007/s13132-011-0049-4.
- Mahsun, Mohamad. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (3th ed). Yogyakarta: BPFE.
- Nelson, Debra L., & James Campbell Quick. 2005. *Understanding organization Behaviour*. Ohio: South-Western
- Parmenter, David. 2007. *Key Performance Indicator (developing, Implementing and Using Winning KPIs, United State of America*

- Piirainen, T. & Koski, P. (2004), Integrating workplace development policy and innovation policy. A challenging task. Experiences from the Finnish Workplace Development Program, pada Fricke, Werner and Totterdill, Peter (eds) Action Research in Workplace Innovation and Regional Development. Amsterdam: John Benjamins, pp. 313–331
- Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada